

KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN PPID KABUPATEN BARRU TAHUN 2023

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Data Pribadi ASN	a. Undang undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public pasal 17 huruf h	1. Mengungkap data pribadi yang merupakan ranah privasi 2. Kemungkinan Penyalahgunaan informasi	Melindungi data pribadi yang harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaanya	Tidak terbatas, kecuali atas persetujuan yang bersangkutan
2	Dokumen dan proses usulan mutasi/ pengangkatan ASN dalam jabatan struktural/ fungsional	a. Undang undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf g dan h	Mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	Menjaga kondusifitas di lingkungan kerja	Sampai dengan pelantikan/mutasi
3	Dokumen proses ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	a. Undang undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf h b. Peraturan pemerintah nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS c. Perka BKN nomor 21 tahun 2010 tentang juklak PP nomor 53 Tahun 2010	Mengungkap data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

4	Daftar kekayaan ASN kecuali ASN yang wajib LHKPN	<p>a. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf J</p> <p>b. Undng – undang nomor 8 tahun 1981 tentang hokum Acara Pidana pasal 322</p> <p>c. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kerasipan pasal 44</p> <p>d. Keputusan ketua Komisi pemberantasan korupsi Nomor Kep.07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan laporan Harta Kekayaan penyelenggara negara</p>	<p>- Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia</p> <p>- Timbulnya penyimpangan</p>	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat Rahsia	Tidak terbatas, kecuali atas persetujuan yang bersangkutan
5	Data Wajib Pajak	<p>a. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf h</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah Bab 14 pasal 172</p>	Dikhawatirkan akan terjadi penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi kerahasiaan wajib pajak	Selama perda belum dicabut

6.	<p>Informasi yang mengungkapkan sistem informasi elektronik, sistem persandian, dan keamanan daerah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Topologi dan konfigurasi jaringan - Lokasi, topologi dan konfigurasi server - User Acces dan Pasword sistsem elektronik pemerintah - Alat persandian Utama - Kunci sistem sandi - Tempat Kerja Sandi - Berita Sandi 	<p>a. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> <p>b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat disalahgunakan dan dapat merusak sistem informasi elektronik - Dapat membahayakan keamanan masyarakat dan negara 	<ul style="list-style-type: none"> - Mencegah penyalahgunaan dan potensi perusakan sistem informasi elektronik - Mencegah dampak negatif pada kondisi keamanan masyarakat dan negara 	Tidak Terbatas
7.	Data terkait proses pemilihan pengadaan barang dan jasa	<p>a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, h</p> <p>b. Peraturan presiden nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas presiden nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat memunculkan persaingan yang tidak sehat dalam proses pengadaan barang dan jasa - Berpotensi disalah gunakan oleh yang tidak bertanggung jawab 	<ul style="list-style-type: none"> - Mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab - Dapat menjamin kelancaran pengadaan barang/jasa yang transparan,akuntabel dan tepat waktu 	<p>Sampai dengan proses pemilihan pengadaan barang/jasa selesai, Kecuali informasi yang dapat dibuka meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pagu - Sumber Dana - Waktu Pelaksanaan - Satuan Kerja - Metode Pemilihan - Syarat Kualifikasi - Jenis Kontrak - Lokasi - Kualifikasi Usaha

8.	Data terkait proses / Tahap Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari - Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta perubahan Kontrak yang mengandung informasi yang divualikan	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, b. Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Seha	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Menjamin kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	30 Tahun
9.	Data terkait proses / Tahap Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari : 1. Surat Tagihan 2. Surat Perintah Membayar 3. Surat Perintah Pencairan Dana	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b Poin 3 dan Poin j b. UU 24 Tahun 2013 tentang Perubaha Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. c. Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Menjamin kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	30 Tahun

10.	<p>Data terkait proses / Tahap Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan (yang memuat hasil Analisis Jasa Konsultansi); 2. Laporan Penyelesaian Pekerjaan (yang memuat hasil Analisis Jasa Konsultansi); 	<ol style="list-style-type: none"> a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b b. UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 58(1) c. Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 	<p>Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p>	<p>Menjamin kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p>	<p>70 Tahun</p>
11.	<p>Data terkait proses / Tahap Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan; 2. Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over; 3. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over 	<ol style="list-style-type: none"> a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b b. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 	<p>Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p>	<p>Menjamin kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p>	<p>Dikecualikan sampai serah terima akhir pekerjaan</p>
12..	<p>Daftar DP3/SKP PNS / Penilaian Kinerja / Prestai Kerja PNS</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. UUD Negara RI Tahun 1945 pasal 28 a s/d 28 h b. UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf h c. PP No. 11 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja pegawai 	<p>Mengungkap Data Pribadi PNS yang bersifat rahasia</p>	<p>Melindungi Data Pribadi PNS yang bersifat rahasia</p>	<p>25 Tahun</p>

13.	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Lembar Temuan Pemeriksaan (LTP)	<p>a. PP Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 3, Pasal 23 Ayat 1</p> <p>b. UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 Ayat 3 (e), Pasal 7 Ayat 2, Pasal 17 Huruf I dan J</p> <p>c. Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pemeriksaan Investigasi, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah dan Pemberian Keterangan Ahli Pasal 18 Ayat 3</p>	<p>- Mengungkap rahasia hasil pemeriksaan khususnya kerugian negara / daerah</p> <p>- Menimbulkan stigma yang tidak sesuai dengan karena perbedaan persepsi atas suatu pernyataan penilaian antara birokrasi dan masyarakat pada umumnya</p>	<p>- Menjamin Kerahasiaan Hasil Pemeriksaan</p> <p>- Rekomendasi / Pernyataan yang dimuat dalam LHP dan LTP dapat lebih efektif dan kondisi untuk adanya perhatian sistem tata kelola</p>	Dapat dibuka kepada yang terkait atau mendapat persetujuan pimpinan
14	Berkas Rekam medis	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	<p>- Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang</p> <p>- data dapat dimanipulasi atau disalahgunakan untuk tujuan kejahatan</p>	<p>- Melindungi rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan seseorang yang dilindungi undang –undang</p> <p>- Melindungi data dari manipulasi, pemalsuan atau penyalahgunaan untuk tujuan kejahatan</p>	Jangka waktu penyimpanan BRM 25 (dua puluh lima) tahun sejak tanggal kunjungan terakhir Pasien
15	Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan	Undang Undang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan	Berpotensi disalah gunakan oleh yang tidak bertanggung jawab	Berpotensi disalah gunakan oleh yang tidak bertanggung jawab	Setelah diaudit

16	Arsip Dinamis yang sifatnya rahasia	<p>a. UU Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan</p> <p>b. UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf i</p>	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi Kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
17	Usulan Pelepasan Varietas Baru	<p>a. UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf b</p> <p>b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor37/Permentan/OT.14/2006 tentang Pengujian, penilaian, pelepasan dan Penarikan Varietas</p>	Dapat diperjual belikan terhadap varietas yang akan dilepas dan kemungkinan bisa dilepas pihak lain	Mencegah varietas baru diambil oleh pihak lain	Setelah Varietas dilepas
18	Daftar Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi korban	Menjaga rahasia pribadi korban	Tidak terbatas / Kecuali untuk data pemeriksaan lebih lanjut oleh Pihak yang berwajib
19	Data Penduduk by Name by address (Sidik Jari, Iris Mata, tanda tangan, keterangan tentang cacat, fisik/mental dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang)	Undang Undaang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79 ayat 1	Dapat disalah gunakan oleh Pihak yang tidak bertanggung jawab dalam memalsukan identitas	Menjamin Kerahasiaan dan kemanan Data Penduduka By Name By Adress	Tidak terbatas

20.	<p>Arsip Digital Pribadi Pemohon Izin meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - KTP - PBB Tahun Terakhir - NPWP - Surat Bukti Kepemilikan Tanah - Ijazah - Akta Notaris 	<p>a. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> <p>b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</p>	<p>Dapat disalah gunakan oleh Pihak yang tidak bertanggung jawab dalam memalsukan identitas</p>	<p>Melindungi Arsip Digital Pribadi</p>	<p>Tidak Terbatas</p>
21	<p>Data base Perizinan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nomor Pendaftaran - Nomor Izin - Nama dan Alamat Pemohon - Jumlah dibayarkan 	<p>a. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> <p>b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</p>	<p>Dapat disalah gunakan oleh Pihak yang tidak bertanggung jawab dalam memalsukan identitas</p>	<p>Melindungi Data Base Perizinan</p>	<p>Tidak Terbatas</p>
22	<p>Data pribadi penerima bantuan sosial</p>	<p>a. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> <p>b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</p>	<p>Membuka rahasia pribadi seseorang dan dapat digunakan oleh Pihak yang tidak bertanggung jawab</p>	<p>Menjaga kerahasiaan pribadi dan perlindungan hak pribadi</p>	<p>Sampai Pihak yang bersangkutan mengizinkan</p>

23	Data nilai peserta ujian Pemerintah Kabupaten Barru : - CPNS - Ujian Dinas - Ujian Kenaikan Pangkat penyesuaian Ijazah - Uji Kompetensi	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4	Menimbulkan keresahan bagi peserta ujian	Menjaga kondisi yang kondusif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru	Sampai dengan adanya pengumuman resmi``
24	Ijin Perceraian PNS	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i b. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian PNS	Menimbulkan resiko adanya campur tangan dari pihak yang tidak bertanggung jawab	Menghindari campur tangan dari Pihak yang tidak bertanggung jawab	Sampai proses perijinan dan keputusan selesai
25	Identitas dan Data Pribadi Pelanggaran Penegakan Peraturan Daerah dan yustisi	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja	Penyalahgunaan oleh Pihak yang tidak bertanggung jawab	Menjaga kerahasiaan Identitas dan Data Pribadi pelanggar	Data yang dibuka Cuma rekapan jumlah pelanggar

26	Dokumen pemeriksaan dan rewiev (nota analisa, kertas kerja pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan dan nota hasil pemeriksaan)	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Ps. 17 Huruf I) b. UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Pasal 3) 	Dapat disalahgunakan gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	terbatas sampai dengan telah dilaporkan kepada BPK sesuai dengan pasal 3 UU nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
27	Dokumen tindak Lanjut hasil Pemeriksaan regular: <ul style="list-style-type: none"> 1. Laporan hasil pemeriksaan kasus 2. Laporan hasil pemeriksaan khusus 3. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil 	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Ketentuan Informasi Publik (Ps. 17 Huruf I) b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara c. PP No.12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah d. PP No.60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Tidak terbatas kecuali mendapatkan persetujuan dari badan peradilan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 18 Ayat (3)

28	<p>Arsip dinamis yang menyangkut dokumen SPJ keuangan kegiatan dan perjalanan dinas</p> <ul style="list-style-type: none"> - SPJ berikut lampirannya - Dokumen Anggaran dan otorisasinya - Surat pencairan anggaran (SPM) 	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Ketentuan Informasi Publik (Ps. 17 Huruf I)</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Pasal 44 Ayat (1) Dan (2)</p>	<p>Dapat disalahgunakan gunakan oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab</p>	<p>Melindungi kerahasiaan dokumen</p>	<p>Terbatas sampai setelah selesai di audit</p>
29	<p>Identitas penderita HIV/AIDS</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Ketentuan Informasi Publik (Ps. 17 Huruf I)</p>	<p>Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang</p>	<p>Melindungi rahasia pribadi seseorang</p>	<p>Sampai ada persetujuan dari yang bersangkutan</p>